



PANDUAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Untuk SMA

Panduan Pendidikan Antikorupsi

untuk Jenjang **SMA**

Panduan (Petunjuk Teknis) Pendidikan Antikorupsi untuk Jenjang SMA

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK
Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950
<https://www.kpk.go.id>

ISBN: _____

Penerbitan buku ini merupakan hasil kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) serta Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)

Pengarah:

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK
Wawan Wardiana

Penanggung Jawab:

Direktur Jejaring Pendidikan KPK
Aida Ratna Zulaiha

Koordinator:

Jermia Djati
Sari Angraeni

Tim Penulis:

Adesti Komalasari

Tim Penelaah:

Indira Anggraini Zachriyan
Pipin Purbowati
Febria Angelina Lebang

Tim Supervisi:

Ardanti Andiarti
Indriyanti Herutami
Stien Matakupan

Tim Kontributor:

Zulfadhli Nasution

Aprianti Purwaningrum

Feri Perdian

Nilian Alizhar

Roto Priyono

Beatrix Kasihuw

Cetakan Pertama: Jakarta, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk pendidikan serta nonkomersial lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan



Pengantar Pimpinan KPK

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya, penyusunan Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi untuk jenjang PAUD Dasmen ini dapat diselesaikan. Panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi jejaring pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi (PAK) pada jenjang pendidikan dini, dasar, dan menengah; pendidikan tinggi; maupun pelatihan ASN, dan ekosistem pendidikan secara umum (disesuaikan).

Inisiasi penyusunan panduan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pendidikan. Secara umum, KPK memiliki tiga pemberantasan korupsi yang dikenal strategi trisula pemberantasan korupsi yang terdiri dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Secara khusus, strategi pendidikan bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku antikorupsi. KPK mengupayakan hal tersebut dengan menasar beberapa segmen di antaranya yaitu peserta didik, baik dari jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, hingga masyarakat umum. Selain dalam bentuk buku panduan, KPK bersama dengan berbagai mitra jejaring pendidikan melakukan inovasi dan pengembangan bahan pembelajaran seperti komik, buku saku, film, dan juga permainan (boardgame) sehingga pembelajaran antikorupsi bisa lebih menarik dan variatif.

Hal strategis lainnya adalah KPK mendorong terbitnya berbagai regulasi sebagai payung hukum implementasi PAK pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya pendidikan karakter yang tercantum dalam Perpres 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Beberapa regulasi implementasi PAK yang telah terbit, di antaranya adalah; 1). Permenristekdikti No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi; 2). Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam No. B-1368.1/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah, 3). SE Mendagri No. 420/4047/SJ dan No. 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, 4). Peraturan kepala daerah pada

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk implementasi PAK pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, dan juga regulasi dari kementerian teknis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

Panduan ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi mitra pendidikan dalam implementasi PAK sebagaimana diatur pada regulasi-regulasi di atas. Panduan ini diharapkan juga dapat menjadi inspirasi setiap stakeholders atau jejaring pendidikan untuk berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. KPK juga mendorong untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi penegakan nilai-nilai integritas pada sektor pendidikan. Harapannya, upaya-upaya tersebut mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari masyarakat luas, sehingga tujuan pembentukan generasi yang berkarakter antikorupsi bisa terwujud.

KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut terlibat dalam penyusunan buku ini, baik kepada GIZ, Tim Penulis dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), maupun tim internal KPK yang telah mendedikasikan gagasan dan waktunya sehingga buku ini dapat tersajikan. Memberantas korupsi membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kerja sama dari semua elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Salam Antikorupsi!
Jakarta, Desember 2022

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

**Ada apa saja
di dalam
buku ini?**

DAFTAR ISI

Pengantar Pimpinan KPK	5
GLOSARIUM	9
PENGANTAR	11
Cara menggunakan panduan	11
BAB 1 APA ITU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI?	14
1.1 Perilaku Koruptif di Lingkungan Sekolah	15
1.2 Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang efektif	19
BAB 2 DI MANA POSISI SEKOLAHKU DALAM EKOSISTEM PENYELENGGARAAN PAK	22
2.1 Bagaimana mengetahui kesiapan sekolah saya dalam penyelenggaraan PAK?	22
2.2 Siapa saja yang perlu bergerak dan berperan bersama untuk penyelenggaraan PAK?	25
BAB 3 BAGAIMANA SEKOLAHKU MERENCANAKAN PAK?	37
3.1 Bagaimana kondisi sekolahku?	38
BAB 4 BAGAIMANA KESIAPAN SEKOLAHKU?	41
4.1 Prinsip-prinsip implementasi PAK	41
4.2 Bagaimana kesiapan sekolahku?	42
BAB 5 BAGAIMANA LANGKAH-LANGKAH MENGIMPLEMENTASIKAN PAK?	48
5.1 Langkah-langkah Implementasi di tingkat SMA/SMK	48
BAB 6 APA YANG BISA KULAKUKAN UNTUK LEBIH BAIK?	56
6.1 Refleksi Capaian	57
6.2 Rencana Tindak Lanjut	58

GLOSARIUM

Ekosistem belajar	= Suatu organisasi/situasi belajar yang terdiri dari individual, teknologi yang digunakan untuk pembelajaran, konten yang digunakan untuk pembelajaran, budaya yang berlaku, dan strategi untuk proses pembelajaran yang ada dalam organisasi/situasi belajar tersebut.
<i>Mark-up</i>	= Peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk/menaikkan harga barang/jasa dari semula untuk mencari profit/keuntungan.
Nilai-nilai integritas	= Nilai-nilai yang ditanamkan untuk melindungi dari dan mencegah perilaku koruptif yang terdiri atas kejujuran, tanggung jawab, adil, dipercaya, berani, disiplin, peduli, gigih, mandiri, menghargai.
Pembelajaran partisipatif	= Model pembelajaran yang efektif mengikutsertakan siswa dalam menyusun, menentukan sumber belajar, melaksanakan, dan menilai pembelajarannya tersebut.
Perilaku Koruptif	= Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas seperti sikap tidak jujur, mengambil milik orang lain yang bukan haknya, sikap berpura-pura, sikap menipu, menyembunyikan, menyelewengkan, dan menyalahgunakan wewenang.
Role Model	= Teladan dari segi pola pikir dan perilaku Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk di contoh (tentang kelakuan, perbuatan, sifat, dan sebagainya)
Stranas PAK	= Arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pendidikan antikorupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi di Indonesia.
Tahap kesiapan	= Indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu konsep untuk diimplementasikan dalam satuan pendidikan
Tindak Pidana Korupsi	= Suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan dan merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
Trisula KPK	= Strategi Pemberantasan Korupsi yang diusung oleh KPK yang mencakup tiga hal: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Pengantar

Cara Menggunakan Panduan

PENGANTAR

Cara menggunakan panduan

Pendidikan Antikorupsi berperan untuk lebih meningkatkan lagi nilai-nilai integritas sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami dan dilakukan secara normatif. Panduan ini digunakan untuk membantu sekolah merancang kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sehingga nilai-nilai integritas terinternalisasi dalam setiap warga sekolah dan menjadi kebiasaan.

Nilai-nilai Integritas yang diusung KPK dalam Pendidikan Antikorupsi dikelompokkan menjadi tiga dimensi: dimensi karakter, dimensi tata kelola, dan dimensi ekosistem. Ketiga dimensi dan contoh-contoh penerapannya ini perlu dipahami semua warga sekolah untuk menjadi bahan refleksi dan menjadi dasar menyusun langkah strategi implementasi pendidikan antikorupsi.

Bab 1

Bab 1 di buku panduan ini mengajak sekolah untuk mengenal perilaku koruptif dan sepuluh nilai-nilai dimensi karakter. Bab 1 juga akan memberikan informasi tentang elemen-elemen kunci atau bagaimana penanaman nilai yang dilakukan dapat disebut sebagai Pendidikan Antikorupsi.

Bab 2

Bab 2 mengenalkan nilai-nilai dimensi tata kelola dan ekosistem untuk membantu sekolah mengenal kesiapan sekolahnya dan aktor-aktor yang bisa dilibatkan dalam implementasi pendidikan antikorupsi.

Bab 3

Bab 3 mengajak sekolah untuk mulai merencanakan implementasi pendidikan antikorupsi sekaligus mengajak sekolah memetakan nilai-nilai integritas mana yang sudah berjalan dan yang masih harus diperhatikan untuk dikuatkan.

Bab 4

Bab 4 mengajak sekolah untuk memperhatikan apa yang harus terlihat dalam setiap kegiatan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memahami prinsip-prinsipnya. Sekolah juga akan dipandu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk melihat kondisi kesiapan sekolahnya.

Bab 5

Bab 5 menuntun sekolah untuk merencanakan pendidikan antikorupsi dalam satu semester dan dilengkapi dengan cerita dari masing-masing jenjang.

Bab 6

Bab 6 membantu sekolah untuk merefleksikan lagi pengalaman yang didapat selama proses implementasi pendidikan antikorupsi selama satu semester. Sekolah juga dipandu untuk membuat rencana tindak lanjut dengan melihat kembali apa hasil refleksinya.

Semoga panduan ini benar-benar memandu sekolah dalam menjalankan pendidikan antikorupsi, menguatkan integritas, dan mengajak lebih banyak aktor untuk keberlanjutannya.

1 APA ITU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI?

- 1.1 Perilaku Koruptif di Lingkungan Sekolah
- 1.2 Elemen Kunci Pendidikan Antikorupsi

BAB 1 | APA ITU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI?



Tindakan korupsi berpotensi merusak dan menghancurkan bangsa sehingga harus segera diberantas sampai ke akar-akarnya. Topik pemberantasan korupsi sering dikaitkan dengan pemberian sanksi pidana yang seberat-beratnya pada koruptor dengan berbagai instrumen hukum seperti aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun negara Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum yang berkewajiban melaksanakan peraturan dalam pemberantasan korupsi, data menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi tidak kunjung surut. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dengan menegakkan sanksi pidana dalam memberantas korupsi belum optimal.

“Korupsi” sebenarnya dekat dengan pengalaman sehari-hari dan berawal dari perilaku koruptif yang sejak dini, apabila dibiasakan dapat terjadi normalisasi perilaku koruptif dan berujung pada tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Jadi, apa sih bedanya tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif?

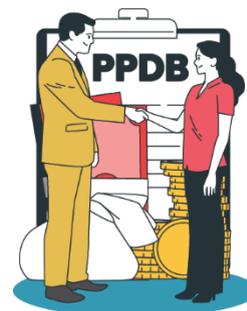


1.1 Perilaku Koruptif di Lingkungan Sekolah

Definisi Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan kelompok. Aksi-aksi korupsi dan perilaku koruptif bisa ditemui di lingkungan sekolah dan bila dibiarkan akan membentuk keberanian seseorang untuk melakukan aksi korupsi yang lebih besar lagi.

Mari kita lihat beberapa contoh perilaku koruptif yang dapat ditemui di lingkungan sekolah

1. Peserta didik berbohong tentang harga alat-alat tulis atau kebutuhan sekolah dan meminta dana yang lebih dari harga sebenarnya kepada orang tua untuk membeli barang-barang tersebut. Bila dibiarkan, seorang peserta didik akan terbiasa untuk selalu menaikkan angka pada anggaran dari harga yang sebenarnya sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih saat bekerja nanti.
2. Orang tua yang memberikan sejumlah uang kepada pihak sekolah supaya anaknya diterima saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), atau memberikan hadiah kepada guru supaya nilai anaknya baik merupakan bentuk suap menyuap dalam sekolah.
3. Peserta didik memalsukan tanda tangan buku penghubung orang tua dan guru, hal ini akan berpotensi menumbuhkan bibit penggelapan surat berharga seperti memalsukan buku-buku atau dokumen barang bukti, dsb.
4. Guru meminta dana tambahan untuk program-program sekolah yang seharusnya diberikan gratis adalah bentuk perilaku koruptif pemerasan.
5. Pihak sekolah menyewa bus yang kurang baik untuk kegiatan di luar kelas (piknik, outing class, study tour), atau menyewa tenda bocor untuk acara sekolah dengan harga yang lebih rendah dari yang dianggarkan



dan kualitas yang tidak sesuai (mark-up) adalah bentuk perbuatan curang yang membahayakan orang lain demi kepentingan pribadi.

6. Kepala sekolah menggunakan rekanannya sendiri sebagai penyedia seragam dan alat-alat tulis yang dijual di koperasi sekolah mengarah kepada bentuk tindak pidana korupsi akan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Orang tua/siswa memberikan hadiah kepada guru/wali kelas merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dari guru terhadap anak/siswa tersebut, yang dapat mengarah pada favoritisme.
8. Guru meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran untuk kegiatan lain tanpa instruksi atau membuat aktivitas bermakna untuk siswa.

Aksi-aksi yang dianggap biasa saja seperti saat peserta didik berbohong kepada orang tua tentang harga alat tulis, memalsukan tanda tangan buku penghubung supaya terhindar dari hukuman, atau saat orang tua memberikan hadiah untuk guru supaya memberikan nilai yang lebih baik untuk anaknya sudah memberikan lahan subur untuk tumbuhnya bibit-bibit korupsi.

Oleh karena itulah nilai-nilai integritas menjadi sangat penting untuk ditanamkan, diterapkan, dan dibiasakan sejak dini.

Jadi, upaya apa yang harus kita lakukan?

KPK terus berupaya menekan angka korupsi, salah satunya melalui jejaring pendidikan, KPK ingin mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik di semua semua jenjang mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), mahasiswa di Pendidikan Tinggi, hingga dunia kerja termasuk ASN pada pelatihan ASN. Namun dalam upayanya, KPK tidak bisa bergerak sendiri. Seluruh elemen dalam masyarakat harus bergerak bersama menanamkan sepuluh variabel yang dimasukkan ke dalam dimensi karakter, yang berisi nilai-nilai sifat untuk menuju kepada kematangan moral.

Sepuluh variabel dimensi karakter yang ditetapkan KPK sebagai nilai-nilai integritas adalah:



1. Kejujuran

artinya menyajikan fakta situasi yang akurat. Beberapa contoh perilaku kejujuran adalah:

- Mengatakan yang benar/tidak berbohong (kesesuaian perkataan dan perbuatan)
- Menghindari perilaku curang (menyontek, plagiat, mengakui karya orang lain)
- Tidak memalsukan apapun (identitas, laporan, nilai, ijazah, data riset, dll)



2. Tanggung Jawab

artinya sebagai karakter seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan dan pekerjaan yang ia lakukan serta berusaha untuk mencegah tindakan yang tidak senonoh oleh orang lain. Beberapa contoh perilaku yang bertanggung jawab adalah:

- Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga selesai
- Siap menanggung risiko dari perbuatan yang dilakukan
- Menepati janji



3. Adil

artinya perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu atau pihak lain. Beberapa contoh perilaku adil adalah:

- Memperlakukan sama pada setiap orang (tidak memihak/membeda-bedakan)
- Memberikan penilaian/pendapat secara objektif dan proporsional
- Seimbang antara menjalankan hak dan kewajiban



4. Dipercaya

berarti rasa yakin pada karakter, kemampuan, kekuatan, atau kebenaran seseorang atau sesuatu. Beberapa contoh perilaku dipercaya adalah

- Menjaga rahasia orang lain atau tugas rahasia yang dipercayakan
- Mengembalikan barang yang dipinjam
- Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan



5. Berani

artinya kekuatan mental atau moral untuk berani, tekun, dan bertahan menghadapi bahaya, ketakutan, atau kesulitan. Beberapa contoh perilaku berani adalah:

- Berani menegur orang lain yang melanggar etika

- Berani melaporkan orang lain yang melanggar etika walau ada risiko dimusuhi
- Berani menolak orang lain yang mengajak berperilaku tidak berintegritas/ melanggar aturan



6. Disiplin

adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan untuk bekerja keras atau berperilaku dengan cara tertentu tanpa perlu ada yang memberi perintah. Beberapa contoh perilaku disiplin adalah:

- Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah
- Menyelesaikan tugas tepat waktu
- Datang ke sekolah/kantor tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan



7. Peduli

berarti kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Beberapa contoh perilaku peduli adalah:

- Membantu orang lain yang mengalami kesulitan dengan ikhlas (tanpa diminta)
- Tidak mengganggu kenyamanan orang lain
- Berbagi ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sesuai kebutuhan orang lain



8. Gigih

berarti menunjukkan sikap rajin terhadap pekerjaannya, ketekunan dalam upaya kerja, dan karakter yang rajin. Beberapa contoh perilaku gigih adalah:

- Tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau tantangan
- Terus berusaha ketika mengalami kegagalan
- Belajar/bekerja tekun dan keras dalam mencapai tujuan yang diharapkan



9. Mandiri

artinya tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh orang lain dalam hal pendapat, perilaku, dll.; berpikir atau bertindak untuk diri sendiri. Beberapa contoh perilaku mandiri adalah:

- Memiliki inisiatif dan bersikap proaktif dalam meningkatkan kemampuan/ pengetahuan
- Mampu mengatur waktu dengan baik

- Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam mengambil keputusan atau tindakan
- Mampu bekerja/ menyelesaikan tugas sendiri tanpa bantuan/ tergantung/diarahkan oleh orang lain



10. Menghargai

berarti menghargai keberagaman pendapat dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam berdiskusi. Menghargai di sini juga berarti menyadari dan menghormati hak-hak orang lain. Beberapa contoh perilaku menghargai adalah:

- Tidak merendahkan orang lain
- Menghormati orang lain terutama orang lain yang lebih tua.
- Menghargai pendapat/pemikiran orang lain meskipun berbeda
- Mendengarkan dengan baik dan aktif pembicaraan/penjelasan orang lain
- Mengapresiasi prestasi/kinerja orang lain dan mengakui kontribusi/peran orang lain dalam kegiatan bersama
- Menyadari dan menghormati hak-hak orang lain sehingga tidak merampasnya untuk kepentingan pribadi.

Perilaku-perilaku di atas hanya berupa contoh saja. Silakan bicarakan dengan warga sekolah anda untuk merumuskan kembali apa yang sekiranya cocok untuk menjadi indikator dari setiap variabel yang sesuai dengan kondisi sekolah anda.



1.2 Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang efektif

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sebuah program pendidikan bila memiliki indikator ketercapaian, tujuan, asesmen, dan memiliki kegiatan-kegiatan yang sejalan/selaras dengan tujuan. Maka dari itu, nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Perlu menjadi landasan dalam berperilaku (berpikir dan bertindak) pandangan hidup,
2. perlu terselenggara dalam berbagai macam kegiatan (kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler,
3. perlu dikembangkan ke dalam budaya belajar kooperatif, dan
4. harus menjadi inisiatif menyeluruh di lingkungan sekolah

Informasi tentang Pendidikan Antikorupsi (PAK), variabel-variabel nilai karakter, contoh-contoh perilakunya, beserta elemen-elemen kunci Pendidikan Antikorupsi adalah pengetahuan dasar untuk mengidentifikasi kondisi sekolah di langkah berikutnya.

Pemimpin dan semua warga sekolah perlu melihat kondisi sekolahnya masing-masing, cara warga sekolahnya berinteraksi, dan hubungan sekolah dengan lingkungan di sekitar sekolah.

Di bab berikutnya, sekolah akan diajak untuk mengukur kondisi sekolah masing-masing, semakin mengenali kesiapan sekolahnya dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dan dapat memetakan siapa-siapa saja yang dapat diajak berkolaborasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



RANGKUMAN

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penting untuk memahami perbedaan antara tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku koruptif di sekolah mencakup berbagai tindakan seperti meminta dana lebih kepada orang tua, memberikan suap untuk keuntungan dalam penerimaan peserta didik baru, memalsukan tanda tangan, pemerasan, dan lainnya.

Untuk mencegah perilaku korupsi, nilai-nilai integritas menjadi sangat penting untuk ditanamkan, diterapkan, dan dibiasakan sejak dini. Ada sepuluh variabel dimensi karakter yang ditetapkan sebagai nilai integritas yakni: kejujuran, tanggung jawab, adil, dipercaya, berani, disiplin, peduli, gigih, mandiri, dan menghargai. Dalam implementasinya, nilai-nilai tersebut perlu memperhatikan elemen-elemen kunci pendidikan antikorupsi.



PERTANYAAN REFLEKTIF

- Apakah Anda sudah dapat membedakan perilaku mana yang termasuk tindak pidana korupsi, dan mana yang termasuk perilaku koruptif?
- Apakah Anda dapat membayangkan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pendidikan antikorupsi? Upaya manakah yang menurut Anda perlu diprioritaskan?
- Dari empat elemen kunci pendidikan antikorupsi, menurut Anda elemen manakah yang sudah diimplementasikan dengan baik di lembaga Anda? Elemen manakah yang masih perlu diperkuat?
- Dari sepuluh nilai yang ada dalam dimensi karakter, manakah nilai-nilai yang sudah membudaya di lembaga Anda? Nilai-nilai mana yang paling penting untuk dibangun?

2

DI MANA POSISI SEKOLAHKU DALAM EKOSISTEM PENYELENGGARAAN PAK?

- 2.1 Bagaimana mengetahui kesiapan sekolah saya dalam penyelenggaraan PAK?
Bagaimana kondisi tata kelola sekolahku?
- 2.2 Siapa saja yang perlu bergerak dan berperan bersama untuk penyelenggaraan PAK?



BAB 2 | DI MANA POSISI SEKOLAHKU DALAM EKOSISTEM PENYELENGGARAAN PAK

2.1 Bagaimana mengetahui kesiapan sekolah saya dalam penyelenggaraan PAK?

Supaya proses penyelenggaraan PAK dapat berjalan lancar, sekolah harus memperhatikan juga apakah sekolahnya sudah memiliki tata kelola yang baik dan kondusif untuk proses penanaman nilai-nilai karakter dan integritas dan menekan potensi perilaku koruptif di lingkungan sekolahnya.

Bila di bab sebelumnya sekolah diperkenalkan dengan nilai-nilai dimensi karakter untuk berefleksi tentang karakter setiap warga sekolah, bab ini memperkenalkan sekolah dengan dimensi tata kelola dan dimensi ekosistem.

Dengan memahami dimensi tata kelola, sekolah dapat mulai melihat dan membahas bagaimana tata kelola di sekolahnya dan menyusun strategi tata kelola yang bebas korupsi.

Delapan variabel dan indikator dimensi tata kelola yang sudah ditetapkan KPK adalah berikut ini:

1. Akuntabilitas

Dapat diartikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa contoh tata kelola yang menunjukkan akuntabilitas adalah:

- Mampu menjelaskan setiap standar perilaku etik yang ditetapkan oleh sekolah.
- Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional.
- Melaksanakan pengelolaan dana sekolah secara bertanggung jawab

2. Transparansi

Maksudnya adalah prinsip-prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan (lembaga), yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Beberapa contoh tata kelola yang menunjukkan transparansi adalah:

- Stakeholder sekolah memiliki akses terhadap rencana dan laporan penggunaan anggaran
- Adanya sistem dan mekanisme yang terbuka dan terstandar pada pemberian beasiswa/bantuan biaya pendidikan
- Adanya sistem dan mekanisme yang terbuka dan terstandar pada layanan administrasi kependidikan

3. Partisipasi

Artinya adanya keterlibatan *stakeholder* dalam perumusan dan pengambilan keputusan rencana pengembangan lembaga, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh tata kelola yang menunjukkan partisipasi adalah:

- Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan Rencana Pengembangan (program kerja dan penganggaran) Sekolah melalui penyampaian pendapat, saran dan keinginan.

4. Efektifitas dan Efisiensi

Adalah proses dan hasil penyelenggaraan lembaga Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan dihasilkan dari penggunaan sumber daya yang tepat. Beberapa contoh tata kelola yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi adalah:

- Alokasi tenaga pengajar yang sesuai dengan jumlah siswa.
- Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan.

5. Tanggung Jawab

Dalam tata kelola adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan sekolah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar. Beberapa contoh tata kelola yang menunjukkan tanggung jawab adalah:

- Pemanfaatan dana dengan kehati-hatian dan sesuai dengan tujuan pengumpulan dana.
- Kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kode etik/tata tertib sekolah

6. Keadilan

Dalam tata kelola mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua orang dalam lingkungan akademik. Keadilan terlihat dalam tindakan yang transparan dengan rekan-rekan, siswa, penilaian siswa, kebijakan sekolah, dan sejumlah masalah lain yang terkait dengan pengajaran dan pembelajaran di lembaga akademik. Contoh tata kelola yang menunjukkan keadilan adalah:

- Memberikan kesempatan yang sama untuk semua warga sekolah.

7. Mandiri

Berarti kemampuan untuk melakukan penilaian yang berdasarkan informasi dan objektif perlu diperluas secara substansial. Contoh tata kelola yang menunjukkan mandiri adalah:

- Rendahnya ketergantungan dengan pihak lain.

8. Aturan Hukum

Dalam tata kelola maksudnya adalah kerangka kerja hukum harus adil dan ditegakkan secara tidak memihak, terutama dalam hukum-hukum mengenai hak asasi manusia. Beberapa contoh tata kelola yang menunjukkan aturan hukum adalah:

- Menerapkan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan warga sekolah sesuai aturan yang berlaku.
- Peraturan di sekolah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku
- Kemampuan peraturan untuk mendorong terciptanya integritas tata kelola

Dengan menggunakan definisi dan contoh tata kelola di atas, sekolah dapat melihat kondisi tata kelola sekolahnya masing-masing, sehingga sekolah dapat merencanakan penyelenggaraan PAK

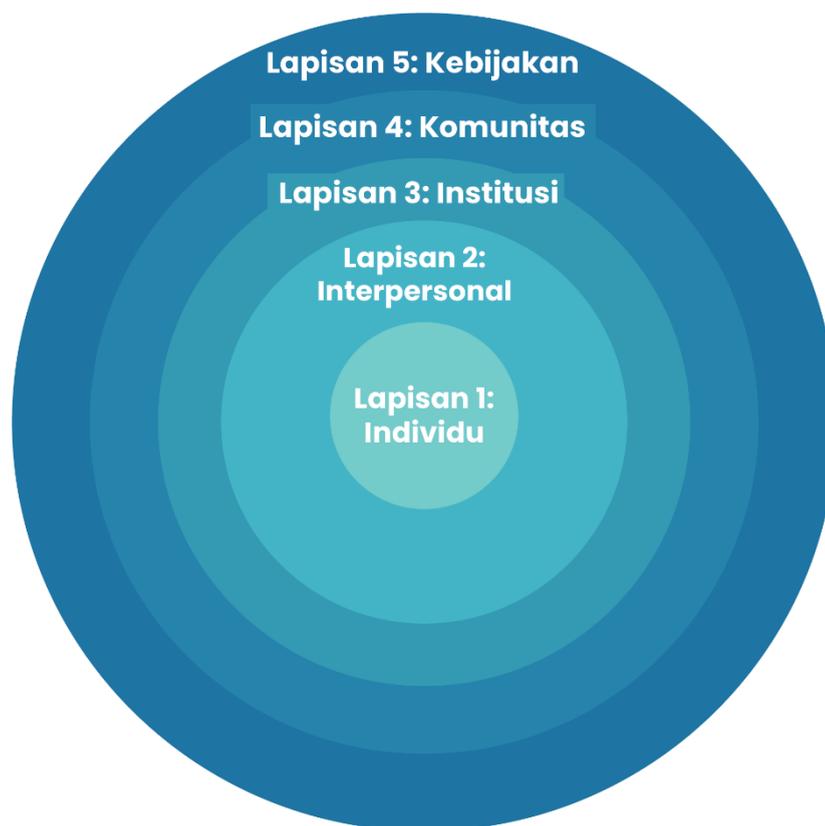
Kemudian, sekolah perlu memetakan siapa saja yang bisa diajak untuk bergerak dan berperan bersama

2.2 Siapa saja yang perlu bergerak dan berperan bersama untuk penyelenggaraan PAK?

Perlu diingat bahwa sekolah adalah bagian dari ekosistem masyarakat yang

tidak dapat bergerak sendiri dalam penyelenggaraan PAK. Sekolah wajib mengajak aktor-aktor lain yang dapat mendukung penanaman nilai karakter di lingkungan sekolahnya.

TAPI, perlu diingat bahwa sekolah adalah bagian dari lapisan-lapisan ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan terdiri dari beberapa lapisan aktor yang saling terkait dan tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Lingkaran lapisan ekosistem di bawah ini menunjukkan bahwa setiap lapisan terdiri atas aktor/pemangku kepentingan yang masing-masing memegang peran dalam menanamkan nilai-nilai integritas serta memelihara penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.



Lapisan Ekosistem	Penjelasan
Individu	Upaya membangun integritas diri oleh setiap individu

Interpersonal	Peningkatan kualitas relasi interpersonal untuk mengenalkan nilai integritas dan menguatkannya melalui keteladanan
Institusi	Komitmen institusi dalam tata kelola pendidikan berintegritas untuk mendukung ekosistem berintegritas
Komunitas	Penguatan norma dan tata nilai kehidupan berintegritas untuk mendukung ekosistem pendidikan
Kebijakan/ Pemerintah	Mendukung penyelenggaraan PAK di setiap jenjang pendidikan dengan instrumen peraturan dan mengatur pelaksanaannya

Untuk mengetahui kondisi ekosistem sekolah, KPK menetapkan enam variabel serta contoh penerapan yang dapat membantu mengukur kondisi sekolah. Enam variabel dimensi ekosistem untuk mendukung penyelenggaraan PAK adalah:

01

Dukungan

Adalah sejauh mana warga sekolah diberi kepercayaan dan penghargaan di lingkungan kerja mereka, serta sejauh mana warga sekolah mengidentifikasi dan mendukung nilai-nilai, norma, dan aturan dalam organisasi dan di sekolah. Beberapa contoh penerapan dukungan adalah:

- Memberikan kepercayaan pada kemampuan peserta didik
- Memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat berperilaku baik
- Memberikan dukungan kepada peserta didik untuk berani bersikap benar dan baik
- Memberikan ruang kepada peserta didik untuk berani berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat

02

Inklusivitas

Artinya memberikan layanan pendidikan kepada setiap peserta didik tanpa terkecuali melalui pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individual mereka. Beberapa contoh penerapan inklusivitas adalah:

- Memberikan pelayanan pendidikan tanpa terkecuali
- Mengakui dan menghargai setiap orang tanpa terpengaruh oleh keragaman latar belakang dan status

03

Kesesuaian

Berarti kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab dengan peran yang dimiliki. Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan kesesuaian adalah

- Memberikan keteladanan kepada setiap orang
- Memiliki kesadaran saat melakukan pelanggaran aturan

04

Kepemimpinan

Adalah perilaku dan keterampilan seseorang dalam menyelaraskan arah kolektif, melaksanakan rencana strategis dalam kelompok, dan terus memperbarui nilai-nilai yang cocok dalam organisasi. Beberapa contoh perilaku kepemimpinan adalah:

- Kemampuan mengelola dan mengatasi persoalan dengan baik
- Mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang diharapkan

05

Profesionalitas

Berarti kemampuan untuk bertindak dengan memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi. Beberapa contoh perilaku profesionalitas adalah:

- Memiliki disiplin yang baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
- Memiliki tanggung jawab yang tinggi sesuai kedudukan, peran dan fungsinya
- Mengedepankan nilai-nilai integritas dalam perilaku integritas akademik di sekolah

06

Kelayakan

Adalah kondisi yang mendorong individu untuk berperilaku etis. Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan kelayakan adalah:

- Menyadari adanya kondisi/faktor eksternal dan pengaruh dari pihak lain yang memungkinkan seseorang untuk berperilaku etis/tidak etis

Sekolah dapat mulai mengidentifikasi aktor-aktor di setiap lapisan yang dapat diajak untuk bergerak dan berperan bersama dalam penanaman nilai-nilai dan dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran kepada sekolah untuk melihat siapa-siapa saja yang dapat diajak berkolaborasi untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi.

Mari kita lihat siapa saja aktor-aktor/pemangku kepentingan di berbagai lapisan masyarakat yang dapat dilibatkan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di sekolah (penjelasan peran setiap pemangku kepentingan.)

Pemerintah Pusat	
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian yang membidangi pendidikan 	Menetapkan regulasi dasar PAK dan menetapkan kurikulum PAK.
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama 	Menetapkan kurikulum PAK untuk madrasah
<ul style="list-style-type: none"> • KPK 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan Stranas PAK dan Panduan PAK 2) Membuat modul ajar PAK
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri 	Mengkoordinasikan kebijakan pemerintah pusat untuk satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Badan Akreditasi 	Melakukan akreditasi sekolah dengan mempertimbangkan indikator terkait nilai integritas dalam proses akreditasi
Pemerintah Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan daerah 	Menetapkan regulasi penyelenggaraan PAK di daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas guru 2) Melakukan proses monitoring pelaksanaan PAK di tiap satuan pendidikan
Aktor pendukung penyelenggaraan PAK di sekolah	
Pengawas Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantau pelaksanaan PAK supaya sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program dan rencana kerja sekolah dengan mengintegrasikan PAK 3) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah terkait integritas dan profesionalisme 4) Melaksanakan penilaian kinerja dan pembinaan guru dan kepek dengan mempertimbangkan integritas dan profesionalisme. 5) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan integrasi PAK
Komite Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan, dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lain terkait pelaksanaan integrasi PAK 2) Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan & program PAK di sekolah 3) Melakukan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran sekolah 4) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah 5) Mendorong orangtua dan masyarakat sekitar perhatian, komitmen dan berpartisipasi aktif dalam penerapan PAK
Organisasi Profesi Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalin kemitraan dengan KPK terkait implementasi PAK 2) Menghimpun pendidik dan tendik untuk giat berbagi ilmu pendidikan karakter integritas atau PAK

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tendik sebagai panutan integritas 4) Mendorong terpenuhinya standarisasi integrasi PAK di satuan pendidikan 5) Menyosialisasikan dan membangun sinergi pentingnya pendidikan karakter integritas pada anak 6) Memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai PAKSI 7) Mendorong terwujudnya satuan pendidikan yang berintegritas 8) Mengupayakan dan turut membantu upaya apresiasi para pendidik dan tendik yang berintegritas dan profesional
Pakar Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendampingan penyusunan kurikulum dan modul ajar PAK 2) Melakukan evaluasi penyelenggaraan integrasi PAK di satuan pendidikan
Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelola implementasi PAK sesuai Stranas PAK dan Panduan PAK 2) Merencanakan program PAK dan integrasi PAK pada mata pelajaran dan ekstrakurikuler 3) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi PAK 4) Melaksanakan kepemimpinan sekolah sebagai <i>role model</i> integritas dan profesionalisme 5) Mendorong guru dan tendik menjadi <i>role model</i> integritas, profesional dan menerapkan nilai integritas 6) Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi supervisi guru dan tendik dalam rangka peningkatan profesionalisme 7) Mengelola sistem informasi manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel

	<ol style="list-style-type: none"> 8) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kegiatan kebutuhan PAK yang diajukan tenaga pendidik maupun masyarakat 9) Mendorong orangtua dan masyarakat sekitar berpartisipasi aktif dalam penerapan PAK
Tenaga Kependidikan	
<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Tata Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelola keuangan dan administrasi ketatausahaan sekolah secara transparan dan akuntabel 2) Sebagai panutan integritas dan profesionalisme bagi peserta didik
<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Ekstrakurikuler 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Integrasi nilai-nilai PAK pada kegiatan pembinaan ekstrakurikuler 2) Menyusun laporan pembinaan ekstrakurikuler secara transparan dan akuntabel
<ul style="list-style-type: none"> • Pembina OSIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan secara transparan dan akuntabel 2) Menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar peserta didik termasuk penanaman nilai integritas 3) integrasi PAK pada program pembinaan OSIS
Tenaga Pengajar	
Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat perencanaan dan melaksanakan integrasi PAK dalam kegiatan pembelajaran 2) Melakukan penilaian karakter anak berdasarkan penerapan nilai integritas 3) Membimbing dan melatih anak dalam penanaman nilai-nilai PAK 4) Sebagai <i>role model</i> integritas, profesionalisme dan penerapan nilai integritas

Aktor di luar sekolah	
Orangtua/ Wali Murid	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai <i>role model</i> integritas, profesionalisme dan penerapan sikap antikorupsi 2) Mengimplementasikan di rumah pendidikan karakter integritas/ PAK yang diajarkan sekolah
Dewan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu menyediakan sumber daya berupa buku teks, materi ajar, dan panduan bagi guru-guru agar mereka dapat mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam pembelajaran sehari-hari. 2) Dapat berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk membantu memastikan bahwa pendidikan anti-korupsi tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan sehari-hari anak-anak. 3) Mempromosikan budaya integritas di antara siswa, guru, dan staf administratif di lembaga pendidikan. Salah satunya dengan memberikan penghargaan untuk perilaku jujur dan bertanggung jawab
Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai <i>role model</i> integritas, profesionalisme dan penerapan sikap antikorupsi 2) Menciptakan lingkungan yang mendukung antikorupsi 3) Membuat materi edukasi antikorupsi yang menghibur supaya dapat lebih mudah diterima masyarakat berbagai kalangan 4) Menyelaraskan nilai-nilai integritas dengan materi edukasi yang diciptakan.

Dunia Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bermitra dengan pendidikan formal untuk memberikan pelatihan anti korupsi kepada siswa melalui program magang, lokakarya, atau berbagai program pendidikan lainnya. 2) Sebagai tempat praktik konkrit transparansi, termasuk di dalamnya pengungkapan informasi keuangan yang jelas dan memastikan bahwa keputusan bisnis tidak dipengaruhi oleh praktik korupsi. 3) Sebagai wadah untuk mempromosikan budaya kerja yang bersih dan jujur, dan memberikan pelatihan pentingnya nilai-nilai integritas dalam pekerjaan.
--------------------	---

Dari penjelasan peran berbagai pemangku kepentingan di atas, sekolah dapat mulai memetakan aktor mana saja yang dapat diajak berkolaborasi supaya penyelenggaraan pendidikan antikorupsi berjalan sesuai dengan konteks belajar sekolah anda.

Bagaimana caranya memetakan kolaborasi antar pemangku kepentingan? (penjelasan jejaring pemangku kepentingan)

Mari kita lihat contoh-contoh bagaimana sekolah merangkul berbagai aktor atau pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di sekolahnya.

Kolaborasi kepala sekolah - guru - dan tenaga kependidikan



Ibu Wulan adalah kepala sekolah SMA Kasihassuh dan sekolahnya sudah berusaha menanamkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab dan disiplin. Namun, masih saja ada guru atau peserta didik yang datang terlambat ke sekolah.

Ibu Wulan kemudian mengajak semua guru-guru untuk berdiskusi bagaimana caranya menanamkan kedisiplinan lebih kuat di semua individu di sekolahnya, supaya kedisiplinan dapat menjadi pandangan hidup yang dipegang kuat untuk semua warga sekolah.

Akhirnya Ibu Wulan dan semua guru menyepakati kalimat-kalimat indikator yang menjadi komponen observasi dan refleksi yang dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan dan mata pelajaran setiap guru.

Pada akhir tahun ajaran, Ibu Wulan, semua guru dan tenaga kependidikan dapat merefleksikan hasil dari indikator nilai kejujuran di sekolahnya dan dapat merencanakan strategi lain supaya nilai kedisiplinan semakin kuat tertanam.

Kolaborasi dinas pendidikan – pengawas



Pak Kebagusan bekerja di dinas pendidikan provinsi Dualima dan melihat fakta bahwa masih terjadi kecurangan dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di beberapa sekolah di daerahnya.

Melihat situasi tersebut, Pak Kebagusan dan timnya mengajak beberapa pengawas untuk membentuk gugus depan pengawasan proses PPDB di semua sekolah di daerahnya, dan menyepakati indikator pencapaian nilai-nilai kejujuran di dalam instrumen penilaian kinerja dan pembinaan guru dan kepala sekolah.

Pak Kebagusan juga memanfaatkan platform online untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang ditemukan di proses PPDB dengan konsep *whistleblower*. Pak Kebagusan memanfaatkan sistem namun juga mengajak diskusi aktor-aktor terkait untuk menentukan indikator kejujuran dalam proses penilaian kinerja.



RANGKUMAN

Untuk menentukan melihat posisi sekolah dalam ekosistem penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (PAK), penting bagi sekolah untuk mengevaluasi kondisi tata kelola sekolah dengan memperhatikan delapan variabel dan indikator dimensi tata kelola yang ditetapkan oleh KPK. Variabel tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, tanggung jawab, keadilan, mandiri, dan aturan hukum.

Sekolah juga perlu memahami ekosistem pendidikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai lapisan seperti individu, interpersonal, institusi, komunitas, dan kebijakan/pemerintah dalam mendukung penanaman nilai karakter dan integritas. Untuk mengidentifikasi kesiapan sekolah, KPK menetapkan enam variabel dimensi ekosistem yang melibatkan dukungan, inklusivitas, kesesuaian, kepemimpinan, profesionalitas, dan kelayakan. Dengan pemahaman ini, sekolah dapat merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan PAK dan melibatkan aktor-aktor yang relevan dalam upaya ini.



PERTANYAAN REFLEKTIF

- Dari delapan nilai yang ada dalam dimensi tata kelola, manakah nilai-nilai yang sudah membudaya di lembaga Anda? Nilai-nilai mana yang paling penting untuk dibangun?
- Dari enam nilai yang ada dalam dimensi ekosistem, manakah nilai-nilai yang sudah membudaya di lembaga Anda? Nilai-nilai mana yang paling penting untuk dibangun?
- Dapatkah Anda mengidentifikasi keterkaitan antar aktor dalam ekosistem pendidikan? Aktor mana yang sudah pernah anda ajak untuk kolaborasi? Aktor mana saja yang masuk dalam lingkup tata kelola sekolah/institusi, aktor mana saja yang masuk ke dalam lingkup ekosistem? Aktor mana yang potensial namun belum dilibatkan

3

BAGAIMANA SEKOLAHKU MERENCANAKAN PAK?

3.1 Bagaimana Kondisi Sekolahku?



BAB 3 | BAGAIMANA SEKOLAHKU

MERENCANAKAN PAK?

3.1 Bagaimana kondisi sekolahku?

Sebelum menyelenggarakan PAK, sekolah perlu merefleksikan/mengidentifikasi nilai-nilai apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan melihat nilai-nilai yang ada di dimensi karakter (**halaman 17 - 19**), tata kelola (**halaman 22 - 24**), dan ekosistem (**halaman 26-27**).

	Nilai-nilai yang sudah berjalan baik dan sudah menjadi budaya sekolah	Nilai-nilai yang masih perlu ditingkatkan lagi
Dimensi Karakter		
Dimensi Tata Kelola		
Dimensi Ekosistem		

Setelah mengisi tabel di atas, sekolah akan memiliki peta/data nilai-nilai apa yang masih perlu ditingkatkan untuk menjadi budaya sekolah. Dari semua nilai-nilai yang masih perlu ditingkatkan tadi, pilihlah satu nilai yang paling perlu diperbaiki untuk menjadi budaya sekolah **dalam satu semester**. Satu nilai itu adalah tujuan yang perlu dicapai sekolah.

Bila sekolah sudah menetapkan tujuan yang akan dicapai, sekolah perlu menetapkan bukti ketercapaian atau indikator-indikator yang menjadi penanda bahwa tujuan tersebut telah tercapai.

Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)	Indikator/bukti ketercapaian
1. -----	a) ----- b) ----- c) -----

Bila sekolah sudah menetapkan indikator/bukti ketercapaian dari nilai yang masih harus diperbaiki tersebut, sekolah akan melihat bagaimana kesiapan sekolahnya dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi.

PAK harus menjadi program yang berkelanjutan
Dan nilai-nilai integritas harus terus ditanamkan
dan dikuatkan.



RANGKUMAN

Sebelum melaksanakan Pendidikan Antikorupsi (PAK), sekolah perlu merefleksikan nilai-nilai yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan, serta memilih satu nilai yang perlu diperbaiki dan menjadi budaya sekolah dalam satu semester, menetapkan indikator ketercapaian, dan mengevaluasi kesiapannya untuk menyelenggarakan PAK sebagai program berkelanjutan.



PERTANYAAN REFLEKTIF

- Apakah Anda sudah memahami apa saja yang perlu dilakukan dari analisis kebutuhan sekolah/institusi hingga refleksi dan tindak lanjut?
- Dari langkah-langkah perencanaan, langkah mana yang sudah biasa dilakukan oleh sekolah/institusi Anda? Langkah mana yang masih memerlukan proses belajar yang lebih banyak? Siapakah pihak yang dapat membantu proses belajar tersebut?
- Apakah rencana aksi yang dibuat sebelumnya sudah selaras dengan tujuan?

4

BAGAIMANA KESIAPAN SEKOLAHKU?

- 4.1 Prinsip-prinsip implementasi PAK
- 4.2 Bagaimana kesiapan sekolahku?



BAB 4 | BAGAIMANA KESIAPAN SEKOLAHKU?

4.1 Prinsip-prinsip implementasi PAK

Setiap kegiatan implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

Substantif



Substansi penguatan nilai integritas harus masuk ke dalam kurikulum, peraturan di sekolah, materi mata pelajaran, kegiatan pembelajaran berbasis proyek, materi yang menghibur melalui pembacaan buku cerita dan panayangan film, dan kegiatan-kegiatan lain yang memantik nalar kritis dan empati, seperti kegiatan eksplorasi dan ekskursi di luar kelas.

Berjenjang dan Berkelanjutan



Materi, kegiatan belajar dan aktivitas penguatan karakter harus dirancang sesuai dengan jenjang dan kemampuan peserta didik dan harus terus berjalan selama masa pendidikan peserta didik di sekolah anda.

Komprehensif



Pendidikan Antikorupsi harus diterapkan secara menyeluruh pada berbagai aktivitas di sekolah, baik dalam kegiatan intra/ekstra/kokurikuler dan dalam praktik kegiatan sehari-hari. Untuk memantau berjalannya PAK dalam berbagai kegiatan, sekolah melibatkan orang tua dan aktor lain yang berperan besar dalam pembentukan karakter peserta didik

Kreatif dan Relevan



Materi, kegiatan belajar dan aktivitas penguatan karakter harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kapasitas guru dan disajikan dengan berbagai macam strategi sehingga penyelenggaraan PAK lebih bermakna dan menyenangkan.

Kolaboratif



Sekolah perlu memetakan aktor-aktor lain yang dapat diajak bergerak dan berperan bersama dalam penyelenggaraan PAK yang berkelanjutan. Misalnya, selain dengan orang tua, sekolah dapat mengajak pemuka agama atau tokoh masyarakat, dan mengundang pakar pendidikan dalam merancang kegiatan PAK.

Setelah memahami prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Antikorupsi, sekolah akan memulai merancang kegiatan-kegiatan dan indikator ketercapaian. Di bagian berikutnya, sekolah akan dibantu memetakan apa yang sudah sekolah lakukan dan apa yang perlu dipersiapkan untuk implementasi Pendidikan Antikorupsi.

4.2 Bagaimana kesiapan sekolahku?

Sekolah perlu melihat program apa yang sudah dilakukan sekolahnya sehingga keluar informasi-informasi yang berkaitan dengan kesiapan. Dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, proses menjalankan sosialisasi, program-program yang sudah berjalan, sekolah akan mengetahui langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyelenggaraan PAK.

Untuk mengidentifikasi sejauh mana sekolah sudah menghidupkan nilai-nilai integritas, sekolah dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut:

Dimensi Karakter	<ul style="list-style-type: none">• Apa saja bentuk keteladanan guru, tenaga pendidik, dan pemimpin sekolah dalam menanamkan karakter di sekolah?• Apa saja nilai-nilai integritas sudah selaras dengan subelemen profil pelajar Pancasila atau dengan nilai pendidikan karakter?• Apa saja aspek pendidikan antikorupsi yang sudah diajarkan guru melalui proses pembelajaran?• Apa saja aktivitas atau kegiatan siswa yang sudah mencerminkan budaya kolaborasi?
------------------	---

<p>Dimensi Tata Kelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik nilai-nilai integritas apa saja yang sudah didorong dan memiliki peraturan dengan sanksi pelanggaran yang jelas? • Apa bentuk kegiatan refleksi yang sudah dijalankan semua komponen satuan pendidikan dan yang sudah dilaksanakan secara rutin/berkala? • Dokumen instrumen refleksi apa saja yang sudah menuangkan implementasi nilai-nilai integritas • Apa indikator yang sudah disepakati untuk menjadi poin pengamatan dan refleksi, sehingga PAK dapat menjadi penanaman yang berkelanjutan?
<p>Dimensi Ekosistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bentuk kegiatan yang mengapresiasi pencapaian warga sekolah dalam menerapkan PAK? • Ruang diskusi seperti apa yang sudah diberikan kepada warga sekolah dalam menyuarakan pendapatnya? • Apa tindakan yang ditetapkan sekolah bila mendapati pelanggaran integritas? • Siapa aktor-aktor eksternal sekolah yang sudah diajak berkolaborasi dalam penguatan karakter?

Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi di atas, sekolah mendiskusikan tahapan kesiapan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.

Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membantu sekolah untuk mengidentifikasi kesiapannya, sekolah dapat mulai membuat rencana penyelenggaraan PAK dengan mengisi contoh lembar rencana berikut ini:

<p>Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)</p>	<p>Indikator/ Bukti ketercapaian</p>	<p>Aktivitas</p>	<p>Siapa saja aktor yang bisa dilibatkan</p>	<p>Hasil yang dicapai</p>
---	--------------------------------------	------------------	--	---------------------------

--	--	--	--	--

Contoh lembar rencana di atas dapat digunakan juga sebagai bahan refleksi dan membuat rencana tindak lanjut untuk dilakukan di semester berikutnya.

Tabel di bawah ini memberikan **gambaran contoh-contoh** kegiatan yang menunjukkan tahapan kesiapan sekolah.

Dimensi	Tahap Awal	Tahap Berkembang	Tahap Siap
Dimensi Karakter	<p>Urgensi PAK tersosialisasi pada satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan</p> <p>PAK secara bertahap terintegrasi ke dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan</p> <p>Contoh: Kejujuran</p> <p>Nilai kejujuran perlu masuk ke dalam kurikulum secara bertahap di setiap jenjang</p> <p>Nilai kejujuran dapat menjadi topik yang dibahas dalam berbagai diskusi dan menjadi bagian dari refleksi (tidak</p>	<p>PAK sudah terintegrasi dalam kurikulum dan secara bertahap terimplementasi dalam setiap jenjang pendidikan</p> <p>Tertatanya kurikulum yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan perkembangan diri dari para peserta didik</p> <p>Contoh: Sekolah perlu mendorong agar guru menjadi teladan utama dalam kejujuran (sanksi berat ketika ada pelanggaran)</p> <p>Ada regulasi yang jelas terhadap setiap perilaku tidak jujur.</p>	<p>PAK seutuhnya terintegrasi ke dalam budaya sekolah, kurikulum (intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler)</p> <p>Dalam intra dan kokurikuler, implementasi tercermin dalam silabus yang terstruktur, runtut, dan komprehensif.</p> <p>Tumbuhnya suasana belajar yang saling mendukung dan kooperatif</p> <p>Contoh: Sekolah sudah memiliki tata tertib, agar menjadi pembiasaan, sekolah membuka kotak suara kejujuran agar siswa yang ingin berinisiatif untuk</p>

	harus menjadi mata pelajaran khusus)		melaporkan ketidakjujuran, punya wadahnya
Dimensi tata kelola (ada aturan atau regulasi yang jelas dan cenderung top down)	Berbagai bentuk/indikator praktik nilai integritas dan sikap antikorupsi telah disusun untuk semua jenjang pendidikan Tersedianya tata tertib namun masih satu arah dari guru/sekolah	Praktik antikorupsi menjadi pembiasaan yang secara rutin dilakukan Pembiasaan/habituasi pada setiap proses pelaksanaan pendidikan yang selaras dengan nilai integritas	Satuan pendidikan pada semua jenjang menjadi teladan utama antikorupsi Terdapatnya regulasi yang jelas terhadap setiap tindakan untuk setiap tindakan korupsi atau anti korupsi dan adanya proses penggalian keyakinan kelas/sekolah terhadap nilai nilai PAK
Dimensi ekosistem (inisiatif = ada kesadaran dan cenderung bottom up)	Inisiatif masih dari guru/sekolah, belum dari siswa, dan masih belum menyeluruh (dari guru yang punya kesadaran) praktik-praktik integritas di satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang selaras dengan prinsip CEV Tersosialisasinya cara pandang bahwa belajar adalah proses bertumbuh, bukan	Guru berinisiatif untuk memfasilitasi siswa membuat tata tertibnya sendiri berdasarkan tujuan dari sekolah atau kebutuhan kelas Wadah “bersuara” tingkat kelas, supaya siswa yang ingin berinisiatif ada ruangnya .	Lingkungan pendidikan relatif bersih dari korupsi pada setiap prosesnya, sehingga menjadi kondusif bagi terselenggaranya PAK Ada mekanisme whistleblower, refleksi, pelibatan siswa untuk meningkatkan kesadaran nilai integritas

	kompetisi		
--	-----------	--	--



RANGKUMAN

Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah perlu mematuhi sejumlah prinsip. (1) Substantif, PAK perlu meresap ke dalam berbagai aspek sekolah, seperti kurikulum, peraturan, materi pelajaran, dan kegiatan. Ini harus berjalan (2) berjenjang dan berkelanjutan sepanjang pendidikan peserta didik. (3) Komprehensif, PAK harus mencakup seluruh aktivitas sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan hubungan dengan orang tua. (4) Kreatif dan relevan, materi dan kegiatan PAK harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan disampaikan melalui beragam strategi agar lebih bermakna. (5) Kolaboratif, melibatkan aktor eksternal seperti pemuka agama atau tokoh masyarakat serta melibatkan pakar pendidikan dalam perancangan kegiatan PAK.

Untuk menentukan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi (PAK), sekolah dapat mengidentifikasi nilai-nilai integritas dalam setiap dimensi seperti dimensi karakter, dimensi tata kelola, dan dimensi ekosistem. Saat menganalisa, sekolah dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang rencana penyelenggaraan PAK dengan berbagai tahapan kesiapan.



PERTANYAAN REFLEKTIF

- Dari prinsip-prinsip implementasi PAK, prinsip mana sajakah yang sudah menjadi pegangan dalam pembelajaran keseharian di sekolah/institusi Anda? Prinsip mana sajakah yang masih perlu diperkuat?
- Dari elemen kunci implementasi PAK, elemen manakah yang perlu menjadi perhatian sekolah/institusi untuk diperkuat?

5

BAGAIMANA LANGKAH-LANGKAH MENGIMPLEMENTASIKAN PAK?

5.1 Langkah-langkah implementasi
di tingkat SMA/SMK



BAB 5 | BAGAIMANA LANGKAH-LANGKAH MENGIMPLEMENTASIKAN PAK?

5.1 Langkah-langkah Implementasi di tingkat SMA/SMK

Dalam proses implementasi, sekolah-sekolah SMA/SMK dapat mulai dengan

1. Merefleksikan/mengidentifikasi nilai-nilai apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan melihat nilai-nilai yang ada di dimensi karakter (**halaman 17 - 19**), tata kelola (**halaman 22 - 24**), dan ekosistem (**halaman 26-27**).

	Nilai-nilai yang sudah berjalan baik dan sudah menjadi budaya sekolah	Nilai-nilai yang masih perlu ditingkatkan lagi
Dimensi Karakter		
Dimensi Tata Kelola		
Dimensi Ekosistem		

2. Memilih satu nilai yang paling perlu diperbaiki untuk menjadi budaya sekolah dalam satu semester dan menjadikan satu nilai tersebut sebagai tujuan yang perlu dicapai sekolah.
3. Menetapkan bukti ketercapaian atau indikator-indikator yang menjadi penanda bahwa tujuan tersebut telah tercapai.

Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)	Indikator/bukti ketercapaian
1. -----	a) ---- b) ---- c) ----

4. Setelah indikator atau bukti ketercapaian sudah ditetapkan bersama-sama, sekolah mengidentifikasi kesiapannya dengan

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membantu proses identifikasi dan refleksi berikut ini:

<p>Dimensi Karakter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bentuk keteladanan guru, tenaga pendidik, dan pemimpin sekolah dalam menanamkan karakter di sekolah? • Apa saja nilai-nilai integritas sudah selaras dengan subelemen profil pelajar Pancasila atau dengan nilai pendidikan karakter? • Apa saja aspek pendidikan antikorupsi yang sudah diajarkan guru melalui proses pembelajaran? • Apa saja aktivitas atau kegiatan siswa yang sudah mencerminkan budaya kolaborasi?
<p>Dimensi Tata Kelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik nilai-nilai integritas apa saja yang sudah didorong dan memiliki peraturan dengan sanksi pelanggaran yang jelas? • Apa bentuk kegiatan refleksi yang sudah dijalankan semua komponen satuan pendidikan dan yang sudah dilaksanakan secara rutin/berkala? • Dokumen instrumen refleksi apa saja yang sudah menuangkan implementasi nilai-nilai integritas • Apa indikator yang sudah disepakati untuk menjadi poin pengamatan dan refleksi, sehingga PAK dapat menjadi penanaman yang berkelanjutan?
<p>Dimensi Ekosistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bentuk kegiatan yang mengapresiasi pencapaian warga sekolah dalam menerapkan PAK? • Ruang diskusi seperti apa yang sudah diberikan kepada warga sekolah dalam menyuarakan pendapatnya? • Apa tindakan yang ditetapkan sekolah bila mendapati pelanggaran integritas? • Siapa aktor-aktor eksternal sekolah yang sudah diajak berkolaborasi dalam penguatan karakter?

- Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, skema proses sosialisasi dan program-program untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyelenggaraan PAK.
- Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membantu sekolah untuk mengidentifikasi kesiapannya, sekolah dapat mulai membuat rencana penyelenggaraan PAK dengan mengisi contoh lembar rencana berikut ini:

Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)	Indikator/ Bukti ketercapaian	Aktivitas	Siapa saja aktor yang bisa dilibatkan	Hasil yang dicapai

- Selama proses penyelenggaraan PAK, sekolah perlu juga membuat skema pemantauan. Bila ditemukan adanya langkah yang tidak bisa dilanjutkan, sekolah dengan sigap memiliki wadah untuk membuat strategi supaya langkah-langkahnya tetap selaras dengan tujuan PAK yang sudah ditetapkan bersama.

Mari kita perhatikan satu contoh bagaimana penyelenggaraan PAK dilaksanakan di SMA/SMK

Cerita dari SMK Karbit Bhakti

SMK Karbit Bhakti adalah sekolah negeri yang memiliki reputasi baik dalam mencetak lulusannya dan memiliki daya serap industri yang tinggi. Dengan kemampuan jejaring dengan industri yang baik, SMK Karbit Bhakti ditempa kasus jual beli seragam praktik berupa jas putih yang dilakukan oleh kepala sekolahnya dan langsung dibebastugaskan dari jabatannya.

Guru-guru dan pelaksana tugas yang ditunjuk untuk menggantikan posisi kepala SMK Karbit Bhakti segera mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran nilai integritas serupa atau pelanggaran nilai-nilai integritas yang lain yang mungkin masih terjadi di lingkungan sekolahnya. Pengawas juga terlibat

dalam pengidentifikasian pelanggaran dan memetakan nilai-nilai yang harus lebih ditanamkan dan dikuatkan di lingkungan sekolah.

Warga SMK Karbit Bhakti dan pengawas duduk bersama untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang sudah baik dan yang sudah menjadi budaya sekolah, dan nilai-nilai yang masih harus dikuatkan.

	Nilai-nilai yang sudah berjalan baik dan sudah menjadi budaya sekolah	Nilai-nilai yang masih perlu ditingkatkan lagi
Dimensi Karakter	<ul style="list-style-type: none"> • Adil • Disiplin • Gigih • Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Peduli • Menghargai • Berani • Kejujuran • Tanggung Jawab • Dipercaya
Dimensi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Efektifitas dan Efisiensi • Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan Hukum • Akuntabilitas • Transparansi • Tanggung Jawab • Keadilan
Dimensi Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan • Inklusivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalitas • Kesesuaian • Kelayakan • Kepemimpinan

Melihat pemetaan akan nilai-nilai yang sudah dijalankan dan yang masih harus dikuatkan, SMK Karbit Bhakti menentukan indikator/bukti ketercapaian dari penanaman satu nilai yang dipilih untuk satu semester.

Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)	Indikator/bukti ketercapaian
1. Transparansi	a) Adanya laporan berkala terkait dengan tata kelola sekolah b) Adanya dokumen rinci mengenai pemasukan dan pengeluaran sekolah yang masuk dalam sistem digital (e-finstatement)

Setelah indikator/bukti ketercapaian sudah ditentukan, SMK Karbit Bhakti perlu juga melihat sampai dimana sebenarnya sekolahnya sudah menguatkan nilai-nilai pada dimensi karakter, tata kelola, dan ekosistemnya.

SMK Karbit Bhakti dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu mengenali kondisi sekolahnya, dan warga SMK Karbit Bhakti duduk bersama untuk menjawab pertanyaan.

Dimensi Karakter	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bentuk keteladanan guru, tenaga pendidik, dan pemimpin sekolah dalam menanamkan karakter di sekolah? <i>Guru menunjukkan sikap-sikap yang menjunjung tinggi budaya kolaborasi dalam semua kegiatan di sekolah termasuk dalam kegiatan pembelajaran</i> • Apa saja nilai-nilai integritas sudah selaras dengan subelemen profil pelajar Pancasila atau dengan nilai pendidikan karakter? • Apa saja aspek pendidikan antikorupsi yang sudah diajarkan guru melalui proses pembelajaran? <i>Guru selalu terbuka akan proses penilaian dan selalu mengkomunikasikan bila terjadi kendala untuk datang tepat waktu</i> • Apa saja aktivitas atau kegiatan siswa yang sudah mencerminkan budaya kolaborasi? <i>Aktivitas berkelompok dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler,</i>
------------------	---

	<p><i>dan ekstrakurikuler, terutama dalam kegiatan-kegiatan praktik.</i></p>
<p>Dimensi Tata Kelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik nilai-nilai integritas apa saja yang sudah didorong dan memiliki peraturan dengan sanksi pelanggaran yang jelas? <i>Belum ada sanksi yang jelas akan pelanggaran nilai integritas, namun bila sudah sampai pada tindak pidana korupsi, sekolah dengan tegas mengeluarkan/memutus hubungan kerja.</i> • Apa bentuk kegiatan refleksi yang sudah dijalankan semua komponen satuan pendidikan dan yang sudah dilaksanakan secara rutin/berkala? <i>Refleksi kegiatan dan pelaksanaan nilai dilakukan dalam bentuk laporan verbal setiap minggu dalam rapat guru</i> • Dokumen instrumen refleksi apa saja yang sudah menuangkan implementasi nilai-nilai integritas? <i>Belum ada</i> • Apa indikator yang sudah disepakati untuk menjadi poin pengamatan dan refleksi, sehingga PAK dapat menjadi penanaman yang berkelanjutan? <i>Belum ada</i>
<p>Dimensi Ekosistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bentuk kegiatan yang mengapresiasi pencapaian warga sekolah dalam menerapkan PAK? <i>Belum ada</i> • Ruang diskusi seperti apa yang sudah diberikan kepada warga sekolah dalam menyuarakan pendapatnya? <i>Belum ada</i> • Apa tindakan yang ditetapkan sekolah bila mendapati pelanggaran integritas? <i>Dibebastugaskan bila sudah sampai pada tindak pidana korupsi, seperti penggelapan uang</i> • Siapa aktor-aktor eksternal sekolah yang sudah diajak berkolaborasi dalam penguatan karakter? <i>Orang tua dan mitra industri untuk pengenalan nilai-nilai di dunia kerja.</i>

Setelah melihat jawaban-jawaban dari kondisi sekolahnya, warga SMK Karbit Bhakti mulai mendapatkan gambaran apa-apa saja yang harus dipersiapkan apabila ingin menyelenggarakan PAK di lingkungan sekolahnya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabanya *belum ada atau belum tersedia*, atau *sudah ada, namun ___*.

Setelah mendapatkan informasi tentang kondisi sekolahnya, SMK Karbit Bhakti merencanakan alur kegiatannya

Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)	Indikator/ Bukti ketercapaian	Aktivitas	Siapa saja aktor yang bisa dilibatkan	Hasil yang dicapai (setelah satu semester)
<p><i>Dimensi Tata Kelola: Transparansi</i></p> <p><i>Alasan: Karena laporan keuangan tidak pernah dipaparkan di depan pemangku kepentingan secara berkala</i></p>	<p>a) Adanya laporan berkala terkait dengan tata kelola sekolah</p> <p>b) Adanya dokumen rinci mengenai pemasukan dan pengeluaran sekolah yang masuk dalam sistem digital (e-finstatement)</p>	<p>1) Mengalokasikan satu waktu tetap dalam sebulan untuk mendiskusikan hal-hal terkait tata kelola</p> <p>2) Memonitor setiap kegiatan tata kelola dengan menyediakan wadah bila terjadi pelanggaran dengan skema whistleblower</p> <p>3) Mengadakan pemeriksaan berkala dan pelaporan tentang hal-hal terkait tata</p>	<p>Semua warga SMK Karbit Bhakti, pengawas, dinas pendidikan</p>	

		<p><i>kelola dalam forum yang mengundang dinas pendidikan dan pengawas</i></p>		
--	--	--	--	--

Contoh alur perencanaan di atas membantu kepala SMK Karbit Bhakti untuk segera menyelenggarakan PAK yang sesuai dengan kondisi sekolahnya



RANGKUMAN

Dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK), sekolah dapat memulai dengan merefleksikan nilai-nilai yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan dari dimensi karakter, tata kelola, dan ekosistem. Selanjutnya sekolah perlu memilih satu nilai yang perlu diperbaiki dalam satu semester, menetapkan indikator pencapaian, mengidentifikasi kesiapannya dengan pertanyaan refleksi, dan merancang rencana penyelenggaraan PAK sebagai rencana aksi.

Rencana aksi ditulis dengan isi tujuan, indikator, aktivitas, aktor yang terlibat, dan hasil yang diharapkan, serta membuat skema monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian jika diperlukan selama proses implementasi. Pola ini berlaku di berbagai jenjang sekolah, termasuk juga SMA namun tentu dengan konteks yang berbeda. Telah disajikan juga beberapa contoh kontekstual pada masing-masing jenjang pada bab ini.



PERTANYAAN REFLEKTIF

- Apakah strategi yang direncanakan relevan untuk semua warga sekolah dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai integritas membudaya di sekolah? Apa saja yang mendorong warga sekolah/warga institusi untuk bergerak?
- Apakah strategi yang dijalankan mendorong keberlanjutan sehingga menjadi budaya lembaga (tidak sekadar formalitas atau normatif)? Apakah langkah implementasi yang direncanakan memantik kesadaran nilai-nilai integritas?
- Apakah Anda sudah dapat memetakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi agar implementasi dapat berjalan dengan baik? Tantangan apa saja yang kira-kira akan dihadapi dan bagaimana mengantisipasinya?

6

APA YANG BISA DILAKUKAN UNTUK LEBIH BAIK?

- 6.1 Refleksi capain
- 6.2 Rencana tindak lanjut



BAB 6 | APA YANG BISA KULAKUKAN UNTUK LEBIH BAIK?

6.1 Refleksi Capaian

Setelah selesai melakukan Sekolah perlu melihat lagi apakah kegiatan penyelenggaraan PAK sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu sekolah untuk merefleksikan pencapaian PAK

Keselarasan rencana aksi dengan kebutuhan	Apakah rencana aksi yang dibuat sebelumnya sudah selaras dengan tujuan?
	Bagaimana agar strategi yang dijalankan tidak mendorong sikap sekadar formalitas atau normatif?
	Apakah rencana aksi yang diimplementasikan sudah cukup memantik kesadaran nilai-nilai integritas?
	Apakah rencana aksi yang diimplementasikan sudah untuk menjadi budaya?
Level/tahapan sekolah/institusi	Setelah berjalan 2-3 bulan ini, bagaimana Anda melihat kesiapan sekolah/institusi Anda?
Refleksi Capaian	Siapa yang menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi rencana aksi?
	Apakah institusi sudah memiliki jejaring untuk mengajak kerjasama aktor-aktor lain yang mendukung proses rencana aksi?
	Bagaimana agar strategi yang dijalankan dapat berkelanjutan?

	<p>Bagaimana proses kolaborasi dalam implementasi ini berjalan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah setiap aktor di sekolah/institusi Anda ikut berkontribusi pada implementasi rencana aksi? • Apakah unit-unit kerja yang tersedia (seperti pusat kajian dan LP3M) sudah secara efektif mendukung proses pelaksanaan RA?
<p>Penyelarasan program untuk membangun ekosistem PAK</p>	<p>Apakah ada program dalam institusi Anda yang perlu disesuaikan dengan rencana aksi pemerintah daerah? (untuk institusi)</p>
	<p>Apakah ada program pemerintah daerah yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah? (untuk pemda)</p>

Semua warga sekolah perlu duduk bersama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai refleksi terhadap efektivitas dari kegiatan-kegiatan penguatan karakter. Warga sekolah juga perlu memastikan bahwa kegiatan-kegiatan penguatan karakter sudah cukup melibatkan aktor lain.

Selain itu, sekolah juga perlu mencatat setiap perubahan karakter yang terjadi dalam ekosistem sekolahnya yang merupakan hasil dari kegiatan penyelenggaraan PAK.

6.2 Rencana Tindak Lanjut

Setelah sekolah memperoleh hasil refleksi capaian, sekolah perlu menentukan rencana tindak lanjut dari penyelenggaraan PAK dengan mengulang kembali proses perencanaan PAK yang sudah disesuaikan dengan hasil refleksi capaian

Rencana tindak lanjut dapat mulai direncanakan dengan mengisi poin-poin yang memandu seperti tabel di bawah ini:

Tujuan yang ingin dicapai sekolah (nilai-nilai yang masih harus dikuatkan)	Indikator/ Bukti ketercapaian	Aktivitas	Siapa saja aktor yang bisa dilibatkan	Hasil yang dicapai	Langkah selanjutnya



RANGKUMAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah, langkah evaluasi dan refleksi menjadi kunci. Sekolah perlu merefleksikan capaian PAK dengan pertanyaan yang menyoroti keselarasan rencana aksi dengan kebutuhan, tingkat kesiapan sekolah, peran aktor kunci, kelangsungan strategi, dan kolaborasi antar-aktor.

Semua komponen sekolah harus bersama-sama menjawab pertanyaan ini untuk menilai apakah upaya penguatan karakter telah efektif diimplementasikan. Hasil dari refleksi ini membantu sekolah dalam menentukan rencana tindak lanjut yang melibatkan dimensi yang perlu diprioritaskan, langkah-langkah konkret, indikator pencapaian, waktu pelaksanaan, aktor yang terlibat, dan strategi pelaksanaannya. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan budaya PAK yang berkelanjutan di sekolah.



PERTANYAAN REFLEKTIF

- Apa yang perlu dilakukan agar progres implementasi PAK ini dapat diikuti dengan baik?
- Apakah Anda sudah mengetahui cara mengidentifikasi hal-hal dalam implementasi yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki ke depannya?
- Apakah Anda sudah mengetahui cara untuk menyesuaikan tujuan untuk menentukan tindak lanjut agar implementasi dapat berkelanjutan?

Kita Generasi **Antikorupsi**

Direktorat Jejaring Pendidikan

Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia



@KPK_RI



@official.kpk



KPK RI



Komisi Pemberantasan Korupsi